

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Aktivitas ekonomi *Foreign Direct Investment* (“FDI”) yang secara universal dinilai sebagai sarana dalam sistem perekonomian yang dilaksanakan dalam bentuk investasi modal yang asalnya dari luar negeri sebagai penanaman modal asing yang dilakukan yang pada sebuah negara. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dimengerti bahwa FDI, pada umumnya, menjelaskan bahwa seorang investor pada suatu negara memiliki ketertarikan dalam menaruh modalnya untuk menumbuhkan bisnis di negara lain. Nyatanya, seperti yang telah diteliti oleh Bank Indonesia, semenjak tahun 1990 an, walaupun telah terjadi krisis besar yang mempengaruhi negara Asia, arus FDI telah berpaling dan meningkat dengan pesat di negara-negara Asia (Kurniati dkk, 2007). FDI juga merupakan salah satu indikasi terjadinya sebuah perubahan yang menandakan bahwa perekonomian sebuah negara sudah berkembang secara global.

FDI terdiri dari *inward* FDI dan *outward* FDI. *Inward foreign direct investment* yaitu kondisi suatu perusahaan melakukan investasi atau mengawali kegiatan operasional perusahaannya di negara tujuan (*host country*) yang berbeda dengan negara asalnya (*home country*). Sedangkan, *outward* FDI adalah kondisi perusahaan dalam negeri melakukan ekspansi dan melakukan kegiatan operasional perusahaannya di negara lain, baik dalam bentuk investasi baru (*greenfield investment*),

merger dan akuisisi atau dalam rupa pengembangan bisnis lainnya yang memanfaatkan fasilitas di negara *host country*. Sebagai sebuah aktivitas ekonomi dimana investasi secara langsung dilakukan oleh pihak investor dari pihak luar negeri, dalam praktiknya mengilustrasikan proses berjalannya FDI di suatu negara, diilustrasikan ketika Indonesia yang merupakan negara tujuan ataupun *host country* menyediakan lapangan untuk penanaman modal asing oleh negara asing seperti Singapura ataupun *home country* di Indonesia secara langsung maupun tidak langsung. Secara konseptual, adanya opsi bagi investor asing dalam melakukan FDI akan terpengaruh oleh kondisi dari *host country* maupun kesehatan ekonomi serta strategi dari *home country*. Kondisi *host country* yang memungkinkan dan menarik untuk terjadinya FDI antara lain mencakup situasi pasar, sumber daya yang ditawarkan tersedia, peraturan hukum dan kebijakan liberalisasi FDI oleh pemerintah.

Kondisi yang perlu di analisa sebelum melakukan FDI oleh *home country*, selain kondisi ekonomi, adalah lebih mengarah persiapan dan persepsi resiko akan apa yang diharapkan didapatkan di kemudian hari dari *host country* (Kurniati dkk, 2007). Dengan menanamkan modal dalam sebuah perusahaan yang merupakan *host country* dalam jangka waktu yang panjang, FDI juga dapat mengikutsertakan dua negara atau lebih sebagai kunci dari kombinasi ekonomi internasional. Dalam menjalankan kombinasi ekonomi internasional tersebut, diharapkan bahwa negara-negara dapat menciptakan hubungan yang konstan dan makmur tidak hanya pada bidang ekonomi, melainkan pada seluruh bidang lainnya seperti politik maupun agama.

Keuntungan yang didapatkan dalam melakukan FDI seperti keamanan dalam menanggung pembangunan dalam negeri daripada melaksanakan pembangunan dengan berhutang kepada negara lain. Pada umumnya, suatu negara menggunakan FDI untuk menopang pertumbuhan ekonomi pada *host country* yang mayoritas termasuk dalam penggolongan *developing country* atau negara berkembang. Adapun FDI yang dilakukan oleh investor asing kerap dilakukan pada aspek konstruksi pabrik, pengadaan tanah untuk investasi, pembangunan gedung-gedung baru, dan masih banyak lagi. Terdapat dua bentuk FDI yang dapat dilakukan oleh investor asing di sebuah negara, antara lain melalui FDI secara vertikal dan FDI secara horizontal. Banyak yang memperkirakan bahwa Indonesia merupakan negara yang berpotensi tinggi bagi para investor asing oleh karena banyaknya faktor yang dapat menarik minat investor seperti biaya investasi yang murah, sumber daya manusia yang melimpah serta bahan baku yang tersedia dengan harga yang terjangkau. Dengan alasan tersebut, tidak asing lagi bahwa dapat ditemukan banyaknya perusahaan-perusahaan maupun pabrik-pabrik yang dimiliki oleh pelaku bisnis dari negara lain.

Pemerintah Indonesia mengerti bahwa investasi adalah salah satu faktor terpenting untuk memajukan perekonomian negara. Maka dari itu, pemerintah Indonesia terus-menerus untuk berupaya memperbaiki tata cara berinvestasi agar dapat mendorong keadaan investasi yang jauh lebih baik. Sebagai salah satu negara berkembang untuk mewujudkan pembangunan nasional, Indonesia memerlukan dana yang cukup besar. Dana yang cukup besar tersebut guna perluasan pembangunan

negara di kawasan regional ataupun di kawasan global, sebagai suatu cara untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara-negara maju. FDI diharapkan dapat memberikan manfaat seperti adanya pengiriman teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi maupun efektivitas produksi perusahaan baik secara lokal maupun internasional. Ilmu pengetahuan juga diharapkan dapat menambah wawasan serta kapasitas sumber daya manusia lokal agar dapat bersaing di kancah global, selain mengandalkan teknologi baru tersebut. Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang cakap dapat memajukan kegiatan penelitian dan pengembangan perusahaan.

Pemerintah Indonesia mula-mula membuka jalur investasi asing untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia dengan upaya mengeluarkan UU Nomor 1 Tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau yang biasa disebut dengan BKPM adalah suatu badan yang mengurus penanaman modal di Indonesia yang berkewajiban untuk mengeluarkan persetujuan dan izin atas investasi asing secara langsung. Berdasarkan laporan tanggal 30 Januari 2019 Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA BKPM, sepanjang tahun 2018 Singapura dengan nilai investasi 2,5 miliar USD dengan proyek yang dijalankan sebanyak 2.531, menjadi negara pertama dengan investasi terbesar ke Indonesia. Jumlah ini berkontribusi sebesar 33,7% dari total nilai investasi ke Indonesia. Kemudian disusul oleh Jepang dengan nilai investasi sebesar 1,2 miliar USD atau 16,2% dengan jumlah proyek yang dibangun sebanyak 1.838, sebagai negara yang menduduki posisi kedua terbesar yang menanamkan modalnya ke Indonesia. Selanjutnya ada Malaysia dengan jumlah

investasi sebesar 0,6 miliar USD, sebagai negara ketiga terbesar. Lalu ada Tiongkok dengan jumlah investasi sebesar 0,5 miliar USD, dan Hongkong dengan jumlah investasi sebesar 0,4 miliar USD (BKPM, 2019).

Penanaman Modal Dalam Negeri atau yang biasa disebut dengan PMDN menampung sebanyak 492 proyek. Sementara itu, Penanaman Modal Asing atau PMA menampung sebanyak 294 proyek dalam sektor yang sama. Total nilai investasi sebesar Rp 27 triliun atau 14,1% dalam bidang sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Investasi di sektor tersebut terdiri atas 821 proyek PMDN dan 373 proyek PMA seperti yang terlihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1 Realisasi Triwulan II 2020 BMKG Berdasarkan Sektor



Sumber: BMKG REALISASI PENANAMAN MODAL PMDN-PMA Triwulan II Tahun 2020

Menurut ekonom Maybank Lee Ju Ye, perang dagang membawa dampak dalam mendorong investor asing masuk ke Asia tenggara karena menghindari tarif, dan juga investor asing sangat berminat berinvestasi pada sektor industri, kimia, perangkat keras dan teknologi, dan produk konsumen khususnya manufaktur. Kejadian tren positif FDI pada negara Asia Tenggara ini terjadi berkat melimpahnya sumber daya alam juga pasar yang berpotensi untuk mendirikan perusahaan multinasional, serta ASEAN mengeluarkan kebijakan perdagangan internasional.

Aliran *Foreign Direct Investment* (FDI) ke *emerging market* di Asia meningkat pesat mulai awal tahun 1990-an. Negara ASEAN (Association of South East Asian Nation) telah bertransformasi yang awal mula hanya lima negara berkembang jadi sepuluh negara yang diperhitungkan dalam kancan global, semenjak didirikan pada tahun 1967. Dengan letaknya yang strategis, melimpahnya sumber daya alam, sumber daya manusia yang berkualitas, serta pertumbuhan ekonomi yang kebal terhadap krisis, ASEAN berkomitmen secara ekonomi, perdagangan dan investasi dengan negara-negara besar di dunia. Adanya kerjasama dengan 55 negara di seluruh dunia (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia 2012) melibatkan ASEAN pada tingkat global.

Kawasan ASEAN merupakan area yang menarik sebagai tujuan investasi. Terdapat empat negara ASEAN yang merupakan top *host economics* untuk FDI sejak tahun 2010 sampai tahun 2012 menurut laporan World Investment Report 2013 terbitan UNCTAD. Empat negara yang dimaksud adalah Vietnam, Malaysia, Thailand,

termasuk juga Indonesia. ASEAN telah berhasil dengan sangat baik secara historis dalam menarik *foreign direct investment*. Ini adalah salah satu wilayah berkembang pertama yang menyambut FDI sebagai bagian dari strategi pembangunan yang didorong ekspor dan sebagai hasilnya, pangsa aliran masuk FDI pasar berkembang dan ekspor global tumbuh dengan cepat. Sejak saat itu, sepuluh Negara Anggota ASEAN (AMS) telah berhasil mempertahankan dan bahkan sedikit meningkatkan pangsa FDI mereka pada saat ekonomi pasar berkembang di seluruh dunia mulai merangkul pendekatan yang lebih liberal dan secara aktif bersaing untuk *footloose* FDI, tidak terkecuali China dan India. Tetapi pertumbuhan pesat dalam saham yang disaksikan pada akhir 1980-an dan awal 1990-an belum terulang.

Gambar 1.2 ASEAN *share of the world trade and FDI stock*



Sumber: WTO, UNCTAD

Aliran *foreign direct investment* (FDI) diharapkan sanggup untuk memajukan perkembangan investasi kontinu dalam suatu negara, karena sebagai wujud aliran

modal yang sifatnya jangka panjang dan pasti sensitif terhadap gejolak perekonomian dan kebijakan-kebijakan politik. Pada wilayah Asia Tenggara, diharapkan adanya dorongan aliran masuk FDI untuk membantu perkembangan negara, serta pada wilayah-wilayah Asia Tenggara lah, para investor melihat adanya potensi maupun peluang besar untuk diadakannya investasi terutama pada jasa keuangan dan industri dengan teknologi yang tinggi.

Faktor lain yang mempengaruhi pergerakan aliran FDI di suatu negara adalah suku bunga (real interest rate). Pada bidang perekonomian, besarnya tingkat suku bunga pada sebuah negara membuat pengaruh terhadap investasi asing secara langsung pada bidang perekonomian. Berdasarkan penelitian Nopirin (2011) menyebutkan investor atau pengusaha baru, biasanya melakukan ekspansi juga mengembangkan modal melalui investasi dengan mengamati apabila margin yang diharapkan nilainya lebih tinggi dari suku bunga yang harus dibayar atas investasi tersebut, yaitu biaya pemakaian anggaran (cost of capital). Suku bunga merupakan salah satu faktor yang penting dalam menarik investasi, sebagai peluang bagi investor untuk menempatkan modalnya. Biasanya investor yang menamatkan modalnya dengan memakai pinjaman dari bank untuk mendanai investasi. Apabila suku bunga pinjaman rendah dapat memudahkan investor melunasi pinjaman mereka, investor akan berminat untuk meminjam modal dan mengeksekusikan investasi.

Selain suku bunga, faktor lain yang dapat mempengaruhi FDI di sebuah negara dapat dilihat pada besarnya tingkat inflasi pada suatu negara. Menurut



penelitian terdahulu Samuelson dan Nordhaus (1993) disimpulkan bahwa dalam investasi, inflasi memberikan pengaruh negatif. Diakibatkan karena proyek-proyek investasi dapat berisiko dengan adanya inflasi yang tinggi. Apabila dalam kurun waktu lama, inflasi tinggi membuat penyimpangan informasi mengenai harga-harga relatif serta mengurangi rata-rata masa jatuh pinjaman modal. Pemerintah tidak dapat mengendalikan ekonomi makro dan ekonomi makro sedang tidak stabil, sebagai pernyataan dari inflasi yang tinggi.

Politik merupakan salah satu elemen yang bergerak dan mempengaruhi dalam melaksanakan tata kelola bernegara yang lancar. Berdasarkan Berita Kementerian Luar Negeri Kedutaan Besar Republik Indonesia Kopenhagen Denmark (2018), menafsirkan bahwa politik mempunyai fungsi untuk menjalin dan meningkatkan hubungan politik, ekonomi, keamanan, hukum dan hak asasi manusia pada suatu negara. Dalam bukunya Basri Seta (2011:2) menjelaskan bahwa politik yang mempunyai kata dasar Polis berasal dari kata Yunani yang berarti Negara Kota lalu berkembang menjadi Polities yang berarti warga negara, kemudian berkembang menjadi Politikos yang berarti kewarganegaraan, kemudian berkembang menjadi Politike Episteme yang berarti ilmu politik dan lalu disempurnakan menjadi Politicia yang berarti pemerintahan negara disimpulkan sebagai warga negara yang saling berinteraksi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam seluruh aspek dalam hidupnya. Dengan definisi politik yang ditafsirkan secara berbeda-beda oleh para ahli, maka perkembangan Politik di Indonesia diartikan sebagai sebuah sistem hubungan

antara pemerintah dan masyarakat yang mengumpulkan berbagai kegiatan aspek dalam Negara Indonesia yang bertujuan untuk menjunjung tinggi kepentingan umum di Indonesia dalam menentukan proses, upaya-upaya dalam mewujudkannya, dalam melakukan pengambilan keputusan serta penyusunan skala prioritas bernegara (Pemerintah Daerah Pati, 2014).

Dalam upaya politik untuk menjunjung tinggi tata bernegara yang baik, politik mengeluarkan beberapa produk politik seperti ketentuan, peraturan maupun sebuah fenomena mengakibatkan resiko yang membuat merosotnya FDI pada sebuah negara, seperti resiko politik yang penuh ketidakpastian. Faktanya, FDI lebih sensitif dan lebih mudah terpengaruhi terhadap faktor-faktor politik yang terjadi di suatu negara walaupun sering dikatakan bahwa pergerakan FDI *ex ante* berjalan seiring dengan keadaan ekonomi negara, resiko dari politik tersebut nyatanya merupakan alasan yang secara pesat mempengaruhi pergerakan FDI di suatu negara (Hany, 2019). Telah terbukti di negara Asia bahwa secara tidak sadar risiko politik berpengaruh secara langsung terhadap pengembangan FDI di suatu negara. Beberapa contoh yang dapat diambil adalah resiko politik yang terjadi di Asia Timur Tengah dan Afrika dimana sering terjadinya fenomena politik yang mengakibatkan menurunnya aktivitas ekonomi FDI pada suatu negara tersebut.

Teknologi informasi yang terus meningkat pada belakangan ini membawa perubahan yang signifikan dalam upaya berkomunikasi dan pengorganisasian massa. Ruang publik yang dulu terbatas, sekarang menjadi tidak terbatas juga dapat diakses

oleh siapapun kapanpun dimanapun. Ruang publik virtual adalah ruang publik yang dimaksud. Semakin canggih dan efektifnya ruang publik tersebut membuat banyak orang dapat memanfaatkannya, seperti diciptakannya gerakan sosial dengan nama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disebut dengan GNPf-MUI, didirikan pada akhir tahun 2016. Berdasarkan Fuadi dkk (2018:48), GNPf MUI sebagai gerakan sosial baru yang dapat memanfaatkan ruang publik virtual dengan membentuk Aksi Bela Islam.

Pada penelitian ini akan memusatkan guncangan politik/ *political shock* yang disebabkan oleh Aksi Damai 212. Aksi Damai 212 adalah serangkaian Aksi Bela Islam yang dilakukan pada tanggal 2 Desember 2016. Aksi ini muncul ketika Ahok menyinggung mengenai isi surat Al-Maidah dalam suatu kunjungan ke Pulau Seribu pada tanggal 27 September 2016. Pidato Ahok tersebut direkam oleh Buni Yani selanjutnya diunggah ke Facebook akun media sosialnya. Tidak lama, video tersebut menjadi viral dan membuat masalah baru di Indonesia. Aksi 212 memiliki tujuan menuntut pemerintah untuk mendalami dan menindaklanjuti mengenai pidato yang diduga sebagai penistaan agama yang disampaikan oleh Ahok. Para peserta aksi meminta Ahok diproses hukum dan dipenjara. Beberapa kelompok juga bertugas menggiring opini publik untuk membuat situasi semakin memanas. Namun banyak yang berpendapat bahwa aksi ini tidak jauh dari kepentingan para politisi tertentu. Ada sebuah tujuan politik tertentu yang dibalut sedemikian rapi dalam sebuah aksi yang berbau agama. Aksi 212 ini terbentuk karena masyarakat banyak yang marah juga

kecewa atas pidato Ahok. Dengan berpusat di halaman Monumen Nasional dengan kehadiran peserta mencapai 7 juta orang (Rahmawati,2018).

Seperti yang kita ketahui semua bahwa isu-isu mengenai agama akan sangat cepat menyebar dan memanas. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju juga menjadikan permasalahan ini meluas ke seluruh pelosok negeri. Bahkan melalui media pula lah isu-isu tersebut muncul. Gerakan "Aksi Bela Islam" yang dimulai tahun 2016, dengan demonstrasi besar-besaran pada 2 Desember, menjadi referensi kelompok ini yang dinamakan Alumni 212. Semula gerakan ini bernama Presidium Alumni 212. Gerakan ini berganti nama menjadi Persaudaraan Alumni 212 pada Maret 2018 (Sumandoyo, 2018). Dengan adanya Aksi Damai 212 membuat sentimen negatif pada pasar. Andai demo besar terjadi tetapi berjalan dengan damai tetap akan membuat investor khawatir. Kekhawatiran terbesar para investor apabila aksi tersebut berjalan anarkis dan membuat stabilitas politik goyah yang akhirnya menyebabkan gesekan di kondisi perekonomian (Forddanta, 2016). Aksi Damai 212 terlihat memiliki dampak negatif pada minat investor untuk berinvestasi. Berdasarkan laporan Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA oleh BKPM pada 30 Januari 2019 bahwa total investasi PMA di Indonesia pada Triwulan IV tahun 2016 telah mencapai 101,3 triliun Rupiah. Jika dibandingkan dengan Triwulan 1 tahun 2017, tercatat bahwa Indonesia telah mencapai investasi sebesar 97 triliun Rupiah, di sini terlihat terjadi penurunan sebesar 4,3 triliun Rupiah setelah terjadinya Aksi Damai 212 yang dapat diartikan terjadi pengurangan minat investor asing untuk berinvestasi akibat Aksi Damai 212.

Gambar 1.3 Perkembangan Realisasi Investasi 2013 - 2018



Sumber: BKPM Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan IV dan Januari - Desember Tahun 2018

Presiden (Pilpres), Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Legislatif (Pileg), transisi kepemimpinan pemerintahan, pemberitahuan menteri kabinet, kekacauan politik, peperangan dan kejadian lainnya merupakan contoh kejadian-kejadian politik yang penting di negara Indonesia yang dapat mempengaruhi perekonomian, karena kejadian-kejadian politik sangat lekat dengan keseimbangan perekonomian pada sebuah negara. Para investor dapat memberikan penilaian negatif dari kejadian politik yang terjadi, maka dari itu apabila adanya kejadian politik dapat mengancam keseimbangan negara.

Salah satu kejadian politik yang akan diuji pengaruhnya terhadap aliran dana *Foreign Direct Investment* adalah Aksi 212 yang terjadi pada 2 Desember 2016 silam.

Aksi 212 merupakan peristiwa yang berskala nasional yang berdampak luas sampai dengan skala internasional, oleh sebab itu Peneliti memilih kejadian tersebut. Pada artikel yang dibuat oleh Munthe and Kanupriya (2016) *Indonesia tightens security before protest against Jakarta governor* berhubungan dengan investasi. Jika kondisi politik dan keamanan tidak membuat nyaman investor maka investor tidak akan berinvestasi dan justru malah menghindari, karena situasi politik akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan investor. Investor mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diterima, informasi perlu diperoleh dengan cepat supaya investor segera membuat keputusan. Kebanyakan informasi yang diperlukan investor asalnya dari kondisi internal dan eksternal perusahaan.

Aksi 212 terlihat memiliki dampak negatif pada minat investor untuk berinvestasi. Telah tercatat dan dilansir oleh BKPM pada tanggal 30 Oktober 2017 dalam datanya yang dipublikasikan pada gambar 1.4 di bawah ini bahwa sebelum terjadinya Aksi 212, tingkat PMA di Indonesia pada TW III 2016 periode laporan Juli sampai dengan September mencatat bahwa terdapat sebanyak 99,7 Triliun dimana realisasi PMA terlihat naik dari TW II 2016 yang tercatat sebanyak 99,4 Triliun. Dengan terjadinya Aksi 212 di Indonesia pada akhir tahun 2016, tingkat FDI atau PMA terpengaruhi dimana adanya penurunan dari yang sebelumnya tercatat sebesar 99,7 Triliun menjadi 97 Triliun pada TW I 2017.

Gambar 1.4 Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Triwulan III Tahun 2017



Sumber: BKPM - [https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file\\_siaran\\_pers/Paparan\\_-\\_INDO\\_-\\_TW\\_III\\_2017\\_FINAL\\_update.pdf](https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Paparan_-_INDO_-_TW_III_2017_FINAL_update.pdf)

Dampak negatif yang diakibatkan oleh adanya *political shock*: berdasarkan data yang telah dilansir oleh BKPM tentang pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di Indonesia, dengan adanya Aksi 212 yang terjadi di Indonesia. Penyerapan tenaga kerja yang diakibatkan oleh adanya investasi PMA di Indonesia tertulis sebanyak 309.623 orang pada tahun 2016 triwulan IV. Paska Aksi 212, faktanya tertulis hanya ada penyerapan tenaga kerja sebanyak 126.327 orang tahun 2017 di triwulan I. Penurunan drastis tersebut sebagai angka terendah sejak tahun 2012, dimana hanya 126.327 orang yang diserap untuk menjadi tenaga kerja akibat penurunan investasi penanaman modal asing di Indonesia yang diduga akibat dari Aksi 212.

Gambar 1.5 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2012 - 2017



Sumber: BKPM - [https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file\\_siaran\\_pers/Paparan\\_-\\_INDO\\_-\\_TW\\_III\\_2017\\_FINAL\\_update.pdf](https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Paparan_-_INDO_-_TW_III_2017_FINAL_update.pdf)

Beberapa studi sebelumnya telah melihat dampak dari *political shock* yang terjadi pada negaranya dan melihat hubungan dari *political shock* tersebut terhadap perkembangan FDI namun masih dalam perdebatan bahwa politik dapat mengarahkan perkembangan naik ataupun turunnya tingkat FDI pada sebuah negara dan masih tergolong minim adanya jurnal ilmiah yang dilakukan oleh para pakar untuk meneliti hubungan dari politik maupun *political shock* terhadap ekonomi sebuah negara yang diukur melalui FDI. Penelitian yang dilakukan oleh Abdel (2019), Khan dan Akbar (2013) dan Asiedu et al. (2009) menunjukkan bahwa *political shock* memiliki dampak terhadap FDI dan akibat dari perkembangan FDI yang tidak memiliki imunitas yang baik terhadap gejolaknya perkembangan politik pada sebuah negara menyebabkan



terjadinya pengaruh negatif yaitu penurunan tingkat FDI ketika terjadinya *political shock*. Namun, penelitian semacam itu berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Li (2009) dan Schulz (2009) yang menjelaskan bahwa dengan ketidakstabilan politik tersebut, investor dapat menggunakan momentum tersebut untuk bermain dengan FDI pada suatu negara karena dengan adanya pergerakan politik atau demokrasi, maka akan banyak ruang untuk para investor mengembangkan ide mereka tanpa harus memikirkan adanya hambatan ataupun larangan dari negara maupun pemerintah yang menjalankannya.

*Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* dalam melakukan rilis survei prospek negara tujuan investasi 2017-2019, negara-negara di Asia Tenggara menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki potensi yang sangat menjanjikan bagi para investor. Dilihat dari 15 besar urutan negara di atas, 5 negara yang berada di kawasan Asia Tenggara masuk ke dalam prospek negara tujuan investasi, seperti: Indonesia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Singapura. Indonesia sendiri menempati posisi ke 4 disusul dengan Thailand yang menempati posisi ke 5, Filipina menempati posisi ke 10, selebihnya Vietnam dan Singapura menempati posisi ke 12 dan 13 dalam *ranking* prospek negara tujuan investasi.

Negara-negara pada wilayah Asia Tenggara membuat perubahan kebijakan yang dapat membuat investor menjadi lebih tertarik menanamkan modalnya, informasi tersebut berdasarkan *survey* yang dilakukan oleh UNCTAD. Perusahaan asing yang berinvestasi di beberapa daerah tertentu di Indonesia diinformasikan kebijakan 15-year

*income tax breaks*. Perusahaan asing menanamkan modalnya 100% di dalam perusahaan *brokerage* dan *venture capital* pada kebijakan pemerintah Malaysia. Insentif yang baru dikenalkan dalam proyek-proyek farmasi pada kebijakan pemerintah Thailand. Investasi pada fasilitas produksi oleh Daewoo Bus Corporation serta Intel berencana membuat infrastruktur semikonduktor pertama di Vietnam (Bank Indonesia Working Paper, 2007).

Dengan melihat fenomena yang kontradiktif satu sama lain antara PMDN dan PMA akibat terjadinya Aksi 212 di Indonesia, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengaruh *political shock*: Aksi 212 terhadap perkembangan FDI di Indonesia. Dengan menggunakan data pertumbuhan FDI di Indonesia yang disajikan oleh BKPM serta data yang disajikan secara langsung melalui *website* World Bank, Peneliti akan mengkaji data tersebut dan membandingkan pertumbuhan FDI di Indonesia ketika dan sebelum saat terjadinya Aksi 212 di Indonesia. Selain itu, Peneliti melakukan penelitian tambahan terhadap pengaruh *political shock*: Aksi 212 terhadap suku bunga dan tingkat inflasi di Indonesia yang merupakan variabel kontrol yang akan digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya menjelaskan FDI merupakan aktivitas ekonomi berupa investasi yang dianggap esensial dalam memacu

pembangunan suatu negara. Investasi yang bersifat jangka panjang dan relatif tidak rentan terhadap pergerakan guncangan perekonomian dalam suatu negara ditawarkan melalui aktivitas ekonomi FDI, dan berpengaruh terhadap faktor politik daripada *host country*. Sehingga, menjadi penting untuk mengetahui mengapa hasil dari politik di sebuah negara justru dapat berpengaruh negatif ataupun positif terhadap aktivitas ekonomi investasi FDI. Berdasarkan alasan tersebut, masalah yang akan Peneliti bahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *political shock* berpengaruh terhadap aliran *Foreign Direct Investment* di Asia Tenggara?
2. Apakah *political shock*: Aksi 212 berpengaruh terhadap aliran *Foreign Direct Investment* di Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian yang telah dijabarkan di atas, adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan FDI di Indonesia sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *political shock* terhadap aliran *Foreign Direct Investment* di Asia Tenggara.
2. Untuk menganalisis pengaruh *political shock*: Aksi 212 terhadap aliran *Foreign Direct Investment* di Indonesia.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan mampu memperbanyak referensi mengenai dampak dari politik terhadap FDI. Serta dapat dijadikan motivasi kepada akademis maupun praktisi dalam meneliti hubungan politik terhadap pergerakan ekonomi di dunia.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat sebagai sumber informasi dan tumpuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dengan topik yang sama atau menyerupai.

###### b. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan berguna untuk bahan referensi dalam pengambilan kebijakan atau keputusan yang berkaitan dengan masalah perekonomian pada bidang investasi. Serta menjadi acuan kepada BKPM dalam memantau pergerakan FDI di Indonesia oleh karena FDI merupakan salah satu jalan yang dapat mengembangkan Indonesia, sebagai

negara berkembang, untuk memajukan negara dan dapat menyaingi secara global.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibentuk untuk memudahkan pembatasan dalam penulisan. Adapun sistematika pembahasan, pada masing-masing bab akan di bagi lagi ke dalam subbab-subbab dengan urutan sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini berisikan latar belakang permasalahan, yang selanjutnya akan dirumuskan untuk menjadi permasalahan yang akan diteliti, kemudian dijelaskan mengenai tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

### **BAB II Landasan Teori**

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori dan mencakup penjelasan antar masing-masing variabel, dan hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini serta mencakup hasil empiris yang relevan dengan penelitian dan hipotesis konseptual.

### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini menyajikan mengenai metode penelitian yang diterapkan dalam melakukan penelitian, antara lain jenis penelitian, lokasi penelitian, bahan penelitian, alat dan teknik pengumpulan data, jalannya penelitian serta analisis hasil penelitian.

#### **BAB IV Pengolahan Data dan Analisis**

Bab ini menjelaskan hasil proses pengolahan data penelitian beserta analisisnya untuk menganalisis dampak dari produk politik terhadap FDI di Indonesia dan negara tetangga di Asia Tenggara.

#### **BAB V Simpulan dan Saran**

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang akan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh Peneliti agar dapat tercapai tujuan Peneliti dalam melakukan penelitian. Sebagai tambahan, Peneliti akan memberikan saran umum berdasarkan hasil penelitian yang dapat memberikan nilai tambah dan manfaat kepada pihak akademis maupun praktisi di Indonesia terutama yang secara langsung berkecimpung di dunia politik dan keuangan.